

Perbedaan penafsiran isi perjanjian sewa menyewa oleh para pihak yang mengakibatkan wanprestasi: studi putusan nomor 51/PDT/2017/PT.PLK
= Difference interpretation of the lease agreement by the parties that causing default: case study of court verdict number 51/PDT/2017/PT.PLK

Emmanisty Atas Asih, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20508048&lokasi=lokal>

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai perbedaan penafsiran isi perjanjian yang diakibatkan ketidakjelasan terkait dasar penetapan tarif sewa menyewa dalam perjanjian sewa menyewa alat berat. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan perbedaan perhitungan tarif sewa oleh para pihak, yang pada akhirnya menimbulkan wanprestasi. Selain kecermatan dalam merumuskan perjanjian, pembuatan perjanjian dalam bentuk akta notariil juga merupakan upaya yang dapat membantu meminimalisir perbedaan penafsiran atas suatu perjanjian agar pemenuhan prestasi oleh para pihak dapat berjalan dengan sempurna. Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta, sehingga membantu mengarahkan juga menyamakan interpretasi pada saat pembuatan, pembacaan dan pengesahan perjanjian. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah dasar penetapan dan perhitungan tarif sewa menyewa alat berat berdasarkan praktik; dan, pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 51/PDT/2017/PT.PLK.

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis-normatif, yang diperkuat dengan wawancara terkait praktik penyelenggaraan perjanjian sewa menyewa alat berat khususnya dasar penetapan dan perhitungan tarif sewa, dengan tipe penelitian preskriptif untuk memberikan saran atas permasalahan yang ada.

Hasil penelitian adalah bahwa tarif sewa menyewa alat berat lazim dan biasanya menggunakan tarif minimal dalam satuan jam per bulan berdasarkan pemakaian alat berat yang dicatat berdasarkan Hour Meter (pencatat mekanis) pada alat berat. Kebiasaan tersebut dapat dikategorikan sebagai perilaku yang berulang-ulang dan lazim dilakukan dalam suatu kelompok masyarakat yang penting untuk diperhatikan oleh Hakim, khususnya apabila terjadi perbedaan penafsiran para pihak dalam melaksanakan perjanjian. Hal tersebut dapat membantu mewujudkan terpenuhinya kepatutan dan keadilan yang obyektif di tengah-tengah masyarakat.

<hr>

This study discusses the difference interpretation of the content of the lease agreement caused by the lack of clarity related to the basic tariff determination in the heavy equipment lease agreement. This lack of clarity caused difference interpretation on the calculation of lease tariff by the parties, that causing default. Beside the carefulness in formulating the agreement, making the agreement in the form of a notarial deed is also can help to minimize misinterpretation of the agreement so that the fulfillment of the achievements of the parties can run perfectly. The notary is authorized to provide legal counseling related to the making of the deed, so that it helps direct the same interpretation at the time of making, reading and ratifying the agreement. The

study analysis the practice of basic determination and calculation of heavy equipment lease tariff; and, Judge's consideration on Court Verdict Number 51/PDT/2017/PT.PLK.

To answer these problems, juridical-normative research methods are used, which are strengthened by interviews related to the practice heavy equipment lease agreements, especially the basic determination and calculation of heavy equipment lease tariff, with a type of prescriptive research to provide advice on existing problems.

The results of the study shows the heavy equipment lease tariff is common and usually use a minimum rate in hours per month based on the use of heavy equipment that is recorded on the Hour Meter (mechanical recorder) on the heavy equipment. This habit can be categorized as repetitive behavior and commonly practiced in a group community that is important to be considered by Judge, especially if there are difference interpretations of agreement. This can help the fulfillment of objectivity and fairness of justice in society.